



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Kamis

Tanggal: 07 Maret 2013

Halaman: 2

JADI 'PILOT PROJECT' UNESCO Ruang Publik di Yogya Harus Ramah bagi Difabel

YOGYA (KR) - Organisasi dunia yang bergerak di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan atau United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (Unesco) menaruh perhatian bagi ruang publik di Kota Yogyakarta. Terutama infrastruktur publik yang harus memberikan ruang bagi kaum disabilitas atau difabel.

Hal tersebut diungkapkan Head of Social and Human Sciences Unit Unesco, Charaf Ahmimed didampingi Assistant Programme Specialist Unesco, Daniel Ruiz De Garibay saat melakukan pertemuan internal bersama jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta di Balaikota, Rabu (6/3). "Kami ingin menjalin kerja sama yang erat dengan Yogyakarta. Bagaimana isu kaum penyandang cacat itu diimplementasikan dalam bentuk kebijakan dan penerapan. Termasuk akses terhadap ruang publik," papar Ahmimed.

Pada tahap awal, kerja sama tersebut akan lebih fokus menyoroti pendidikan inklusi di Kota Yogyakarta. Setelah itu, berbagai bidang yang berkaitan dengan infrastruktur kota juga akan dikupas secara mendalam pada tahap selanjutnya.

Menurut Ahmimed, kerja sama Unesco dengan pemerintah daerah yang menyangkut kebutuhan difabel merupakan yang pertama kalinya dilakukan. Organisasinya ingin melihat kesinambungan program, persoalan yang ada di la-



KR-Ardhi Wahdan

Perwakilan dari Unesco saat melakukan pertemuan dengan Walikota Yogyakarta.

pangan hingga hasil pelaksanaan program. Penjajakan itu rencananya akan dilakukan mulai April dengan melihat langsung proses pendidikan inklusi di sekolah-sekolah.

Hasil pengamatan tersebut akan dijadikan model percontohan atau *pilot project* untuk diterapkan di daerah lain di Indonesia bahkan kota-kota di dunia. "Yogyakarta juga memiliki banyak lembaga dan institusi yang peduli terhadap kondisi kota. Seberapa jauh peran para lembaga itu, akan kami dalam juga," imbuh Ahmimed.

Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti menjelaskan, kendati fokus utama kali ini pada sekolah inklusi namun pihaknya juga melibatkan institusi lain diluar Dinas Pendidikan. Antara lain Dinas Perhu-

bungan, Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpaswil) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Hal tersebut agar Unesco bisa mengetahui secara jelas jika kaum difabel mendapatkan sarana untuk pendidikan dan bersosialisasi dengan baik. "Sekarang fokus ke sekolah inklusi. Kemudian nanti merambah pada aspek lain. Terutama infrastruktur di kota ini," ungkapnya.

Kebijakan yang dibuat seperti regulasi, terang Haryadi, bukan hanya menjaga agar ruang publik tidak diserobot untuk aktivitas lain. Melainkan juga membangun kesadaran masyarakat agar bisa merawat dan menjaga ruang publik secara baik. (R-9)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Perekonomian Pengemb. P 2. Dinas Pendidikan 3. Dinas Perhubungan 4. Dinas Pemukiman dan Prasarana 5. Badan Perencanaan Pembangunan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005